

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran ialah perencanaan kerja organisasi ke depan yang dijabarkan dalam bentuk kuantitas, formal dan sistematis.¹ Dalam tata kelola anggaran memuat sistem perencanaan, pengaturan, pengalokasian, pengawasan dan *feedback* yang disusun dengan sistematis berdasarkan perundang-undangan yang ada.² Lembaga pendidikan merupakan salah satu yang melaksanakan perencanaan dalam penganggaran. Pelaksanaan tata kelola anggaran sangat penting dalam menyusun mana dana yang dialokasikan lebih dulu untuk program kerja sekolah. Pengelolaan dana untuk sekolah swasta lebih kompleks dimana anggaran pendapatannya tidak hanya dari dana BOS tetapi juga dana dari Infaq/ SPP. Pendapatan dana BOS bagi sekolah swasta yang nominalnya sedikit tidak dapat menutup semua biaya operasionalnya. Berbeda dengan sekolah negeri yang penerimaan dana BOS yang cukup besar dapat menutup semua biaya operasionalnya. Oleh sebab itu, partisipasi *stakeholder* sangat penting dalam tata kelola anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

Penyusunan anggaran disusun berdasarkan besarnya dana yang dianggarkan untuk rencana kerja sekolah yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Anggaran merupakan tujuan dari persekutuan proses perencanaan dan pengendalian. Dari sini bisa di ambil kesimpulan bahwa anggaran adalah semua rincian biaya mengenai pendapatan dan belanja yang biasanya disusun setiap tahun oleh sebuah instansi atau organisasi sebagai alat perencanaan maupun pengendalian.³

¹ Wann Nurdiana Sari, Murtono, and Erik Aditia Ismaya, “Jurnal Inovasi Penelitian,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2255–62.

² Vara Anggia Lintang, “Analisis Tata Kelola Keuangan Negara Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 4, no. 1 (2021): 310–19.

³ Zahrudin Zahrudin, “Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah,” *Jurnal Administrasi Pendidikan* 26, no. 1 (2019): 46–56, <https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19847>.

Anggaran yang akurat dan tepat menjadikan akuntabilitas dalam kinerja suatu organisasi juga naik. Dalam sasaran anggaran yang jelas dan mudah dipahami oleh *stakeholder* membuat tercapainya program yang akan dilaksanakan. Terkait dengan sasaran dari anggaran yang jelas dan tepat inilah menjadi hal pokok dalam berhasil atau tidaknya sebuah anggaran.⁴

Sekolah/madrasah merupakan organisasi publik yang dituntut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada semua *stakeholder* baik warga sekolah maupun komite sekolah. Akuntabilitas pendidikan secara umum dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan dan akuntabilitas manajemen pendidikan. Akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan tertuang pada Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 disebut bahwa “Pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat”. Sedangkan pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik”⁵

Menurut pasal 59 ayat 1 membahas tentang pengelolaan dana pendidikan yang transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan evaluasi bahwa masyarakat memiliki hak untuk melihat secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kedisiplinan pada peraturan perundang-undangannya.⁶ Transparansi pada laporan keuangan sekolah sangat menentukan kualitas keuangan sekolah tersebut. Semakin transparan dan akuntabel, maka sekolah akan bisa dipercaya dan mendapat dukungan penuh dari para *stakeholder* sekolah.⁷

⁴ Mardiana Mardiana and Supami Wahyu Setiyowati, “Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Spip Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Dimoderasi Partisipasi Penyusun,” *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 12, no. 2 (2021): 116–26, <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.11813>.

⁵ Y Nuryeti, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Manajemen Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah Dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban ...,” *Khazanah Akademia*, 2018, 94–104, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/K/article/view/335/0>.

⁶ Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Keuangan Publik* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2011).

⁷ Suyati, “Tata Kelola Keuangan Sekolah,” *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* Volume 10, no. 1 (2020): 64–75.

Menurut Nor Mubin dalam penelitiannya yang berjudul “Integritas dan akuntabilitas Dalam Pengelolaan Sekolah Keuangan Sekolah Mar asah” menyatakan bahwa pelaksanaan dan penerapan konsep integritas dan akuntabilitas dalam pendidikan selama ini masih belum maksimal di masyarakat baik dari pemerintah maupun para pengemban kepentingan pada semua tahap penganggaran dan pelaksanaannya di sekolah/madrasah”⁸ Disinilah diperlukan peran dari *stakeholder internal* maupun *eksternal* dalam melaksanakan penganggaran yang akuntabel. Dalam pengelolaan dibutuhkan pengawasan dengan upaya mengendalikan masalah keuangan di sekolah.

Pengelolaan anggaran sekolah diperlukan sebuah perencanaan dalam penyusunannya. Dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) menjadi kewajiban sekolah harus sesuai dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yaitu rencana kerja tahunan dengan memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja dalam pendidikan dengan masa kerja satu tahun.⁹

RAPBS merupakan perencanaan dalam memperoleh dana pendidikan dari berbagai sumber pendapatan, sekaligus rencana kerja tahunan yang memuat berbagai aktivitas lainnya beserta penjabaran rancangan pembiayaan dalam satu tahun anggaran.¹⁰ Maka dari itu RAPBS memuat berbagai sumber pendapatan dalam jumlah nominalnya dari dana rutin maupun pembangunannya, seluruh belanja sekolah dalam masa satu tahun anggaran.

Menurut Zahrudin dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah” menyatakan bahwa SMK Karya Bangsa Nusantara belum sepenuhnya menerapkan prinsip dan prosedur yang baik dalam penyusunan RAPBS. Masih ditemukan beberapa aspek belum terpenuhi yaitu struktur tim, penyusunan RAPBS, notulensi yang lengkap setiap rapat dan program dengan rincian

⁸ Nor Mubin, “Integritas Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Atau Madrasah,” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 14, no. 2 SE-Articles (2018): 80–92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3366740>.

⁹ Suyati, “Tata Kelola Keuangan Sekolah.”

¹⁰ Sari, Murtono, and Ismaya, “J. Inov. Penelit.”

anggaran. Sedangkan aspek-aspek yang sudah diimplementasikan yaitu keterlibatan *stakeholder*, pembagian wewenang, penentuan program skala prioritas, dan identifikasi rencana program.¹¹ Dari penelitian Zahrudin ini bahwa pengelolaan APBS yang terarah dan terstruktur dapat menentukan kebijakan anggaran yang sesuai dengan keadaan sekolah/ skala prioritas sekolah.

Sedangkan dalam penelitian Hendri Susanti dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan *Good School Governance* Dan Pengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar” yang menyatakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dalam efektivitas dalam pengelolaan dana BOS.¹² Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pengelolaan anggaran yang melibatkan partisipasi *stakeholder* dapat menciptakan laporan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana BOS.

Anggaran pendapatan sekolah yang berasal dari pemerintah (*principal*) adalah dana BOS. Ada 3 jenis dana BOS yaitu BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Dana BOS Reguler mempunyai 3 tahap pencairannya. Pencairan dana BOS untuk daerah Jepara berupa dana BOS reguler tahap 3 yang di salurkan kepada 13 SMA swata di Jepara dengan jumlah anggaran Rp 1.408.770.000 pada tahun 2021.¹³ Sedangkan dana BOS reguler yang dicairkan tahap 3 kepada 10 SMA Negeri sebesar Rp. 4.738.140.000.¹⁴ Peran *stakeholder* sangat penting dalam pelaporan penggunaan dana, karena penggunaan dana BOS akan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Permendikbud No 8 Tahun 2020.

Dari data di atas bisa kita lihat dana yang dianggarkan pemerintah untuk SMA swasta yang nominalnya sedikit belum bisa menutup biaya operasional bagi sekolah swasta. Karena itu, sekolah swasta menggunakan iuran atau SPP kepada siswanya

¹¹ Zahrudin, “Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah.”

¹² Hendri Susanti, “Penerapan *Good School Governance* (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar” 8 (2019): 1–19.

¹³ Kemendikbud, “Rekap-Pencairan-Bos-2022-03-15 11_06_54 Tahap 3,” 2021, bos.kemendikbud.go.id.

¹⁴ Kemendikbud, “Rekap-Pencairan-Bos-2022-03-17 13_59_36 Tahap 3 Sma Negeri,” 2021.

dalam menunjang biaya operasionalnya. Banyak para murid baru lebih memilih SMA Negeri dikarenakan biaya sekolah yang lebih murah dan fasilitas pendidikan yang lengkap. Oleh sebab itu, banyak SMA swasta yang mengalami kemunduran dalam penerimaan murid baru dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai.

Sekolah swasta yang menarik dana SPP akan mengalami kekurangan dalam penerimaan siswa bisa juga karena kurangnya akuntabilitas oleh pihak sekolah. Salah satu lembaga pendidikan swasta di Jepara yang tetap eksis dengan jumlah penerimaan murid baru yang cukup banyak dibanding SMA swasta lainnya adalah SMA Islam Sultan Agung 02 Jepara. Karena *Good Governance* dalam tata kelola keuangan sekolah menjadikan lebih terarah kedepannya perihal rencana kerja sekolah dan pembangunan dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Karena akuntabilitas dalam tata kelola anggaran sekolah akan meningkatkan kepercayaan wali murid dan masyarakat sekitar.

Akuntabilitas yang dilakukan SMA Islam Sultan Agung 02 Jepara yang merupakan cabang dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang berada di Semarang. Dalam pengelolaan keuangan terdapat pengawasan yang dilakukan oleh yayasan cabang yang ada di sekolah. Tetapi, dalam satu tahun anggaran akan ada pelaporan keuangan ke yayasan pusat yang ada di Semarang. Dalam tata kelola keuangan inilah di perlukan laporan pertanggung jawaban dari pihak sekolah ke komite sekolah maupun yayasan dimana akuntabilitas, transparansi dan efektifitas menjadi point penting dalam laporan APBS di sekolah.

Dari sinilah ketertarikan untuk melakukan penelitian di SMA Islam Sultan Agung 02 Jepara tentang *Good governance* dan partisipasi *stakeholder* dalam tata kelola APBS yang anggaran pendapatannya dari dana BOS dan infaq/SPP. Dalam menerapkan *Good Governance* dengan menerapkan Prinsip Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) dalam menerapkan 13 indikatornya.

B. Fokus Penelitian.

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam tata kelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dalam pengelolaan keuangan sekolah swasta. Dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah inilah, peran *stakeholder*/bagian tata usaha menyajikan laporan

pertanggungjawaban yang akuntanbel dan transparan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan keuangan sekolah.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *good governance* dalam tata kelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) di SMA Islam Sultan Agung 2 Jepara?
2. Bagaimana peran dan partisipasi *stakeholder* dalam tata kelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) di SMA Islam Sultan Agung 2 Jepara?

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *good governance* dalam tata kelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) di SMA Islam Sultan Agung 2 Jepara.
2. Untuk mengetahui peran dan partisipasi *stakeholder* dalam tata kelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) di SMA Islam Sultan Agung 2 Jepara.

E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi *reference* bagi penelitian selanjutnya. Sebagai penambah ilmu dan wawasan dalam praktek tata kelola keuangan sekolah swasta. Dan dalam penelitian ini bisa menjadi perbandingan maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan topik akuntabilitas yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah menjadi evaluasi pihak sekolah dalam tata kelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik. Karena sarana dan parasarana pembelajaran yang lengkap ini merupakan kelebihan oleh *stakeholder* dalam tata kelola APBS yang baik, yang bisa ditiru maupun dicontoh untuk sekolah lainnya.

F. Sistematika Penelitian.

Sistematika adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat wajar dan logis.¹⁵ Dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan setiap bab dalam menjabarkan isi dari penelitian tersebut:

- a. BAB I Pendahuluan, meliputi: latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian.
- b. BAB II Tinjauan Pustaka, meliputi: kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian.
- c. BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik analisis data.
- d. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan meliputi: gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.
- e. BAB V Penutup, Meliputi: simpulan dari hasil dan pembahasan penelitian dan saran-saran.

¹⁵ M.M. Dr.Muhammad Ramdhan, Spd., *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/Ntw_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.